



WALAH KAWAN KAWAN



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA CIREBON**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 telah selesai disusun. Pelaksanaan Penyusunan LKIP Tahun 2024 sebagai bagian dari pertanggung jawaban atasan kinerja yang sudah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKIP ini menggambarkan kaleidoskop realisasi kinerja yang sudah diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama Tahun 2024 dengan sebaik mungkin dan berkolaborasi demi terlaksanakannya kegiatan selama 1 (Satu) Tahun.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf yang sudah bahu membahu menyusun LKIP Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 ini, semoga dapat menjadi acuan ke depan untuk selalu meningkatkan kinerja pelayanan publik yang andal dan responsif. Harapan kami, di Tahun 2025 realisasi kinerja akan lebih maksimal lagi daripada realisasi kinerja Tahun 2024.

Cirebon, 31 Januari 2025

14/ **KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON** 3/



**Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si**  
NIP. 19691214 199003 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon selama tahun 2024 atas kinerja yang sudah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mewujudkan visi Wali Kota Cirebon "Sehati Kita Wujudkan Kota Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah", misi ke-3 Wali Kota Cirebon yang menjadi acuan pelaksanaan urusan perhubungan yaitu "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan" maka ditetapkan rencana kegiatan yang berisi target kegiatan yang hendak dicapai dalam periode 1 tahun

Laporan ini disusun bertujuan untuk melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja di kemudian hari. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 disusun melalui pengukuran kinerja yang telah terealisasi selama tahun berjalan yang melibatkan seluruh bidang dinas perhubungan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan target kinerja yang disepakati dengan hasil pengukuran kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Perhubungan Kota Cirebon memperoleh anggaran sebesar **Rp. 29.120.251.287,-** digunakan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon. Realisasi anggaran final yang sudah diserap sebesar **95,05%** atau setara **Rp. 27.665.769.590** dari total anggaran yang diterima tahun ini.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	2
DAFTAR ISI .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	5
DAFTAR TABEL .....	6
BAB I PENDAHULUAN .....	7
1.1 Latar Belakang .....	7
1.2 Susunan Organisasi dan Tupoksi .....	7
1.3 Isu – Isu Strategis .....	29
1.4 Inovasi Dalam Penyelenggaraan Tugas .....	29
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	32
2.1 Rencana Strategis .....	32
2.2 Arah Kebijakan .....	34
2.3 Indikator Kinerja Utama .....	37
2.4 Perjanjian Kinerja .....	38
2.5 Rencana Anggaran .....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	43
3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	43
3.2 Akuntabilitas Keuangan .....	60
BAB IV PENUTUP .....	79
LAMPIRAN .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon .....	27
Gambar 1.2 Aplikasi Smart PJU .....	28
Gambar 1.3 Petugas PJU .....	29
Gambar 1.4 Tampilan Website SIGFLLAJ .....	30
Gambar 1.5 Pantauan Lalu Lintas Melalui ATCS .....	30
Gambar 3.1 Pengendalian Parkir di Ruas Jalan .....	46
Gambar 3.2 Perbaikan Penerangan Jalan Umum oleh Tim UPT PJU .....	46
Gambar 3.3 Pengaturan Lalu Lintas.....	46
Gambar 3.4 ATCS Dinas Perhubungan Kota Cirebon .....	47
Gambar 3.5 Pemeliharaan Rambu dan Perbaikan Lampu APILL .....	47
Gambar 3.6 Pelaksanaan Angkutan Lebaran dan NATARU .....	48
Gambar 3.7 Sosialisasi Keselamatan Pengguna Jalan .....	48
Gambar 3.8 Forum LLAJ .....	48
Gambar 3.9 Penyerahan Bansos Ojek Online .....	49
Gambar 3.10 Pemasangan marka jalan dan pemeliharaan rambu .....	49
Gambar 3.11 Studi Banding di Kota Surakarta dan Yogyakarta.....	50
Gambar 3.12 Penertiban Parkir Liar di CSB.....	51
Gambar 3.13 Kegiatan DISHUB MENYAPA.....	52
Gambar 3.14 Sosialisasi Ujicoba E-Parkir .....	53
Gambar 3.15 Giat Pelaksanaan Pengaturan Lalu Lintas .....	54
Gambar 3.16 Pelaksanaan Rekayasa Lalu Lintas selama Lebaran .....	55
Gambar 3.17 Kegiatan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) .....	55
Gambar 3.18 Ramcheck di Terminal .....	56
Gambar 3.19 Studi Banding BRT.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	30
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan .....	32
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama .....	34
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	35
Tabel 2.5 Rencana Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2024 .....	36
Tabel 3.1 Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	41
Tabel 3.2 Capaian IKU 1 Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .....	42
Tabel 3.3 Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Service) .....	43
Tabel 3.4 V/C Rasio Ruas Jalan .....	44
Tabel 3.5 Capaian IKU 2 Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJI KIR Tahun 2024 .....	51
Tabel 3.6 Detail Rincian Realisasi Kinerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2024 .....	56
Tabel 3.7 Data Jumlah Penumpang BRT Tahun 2024.....	58
Tabel 3.8 Capaian IKU 3 Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah .....	59
Tabel 3.9 Perbandingan Anggaran 2023 dan 2024 .....	59
Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Terhadap Indikator Capaian Sasaran Strategis .....	60
Tabel 3.11 Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	61

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). SAKIP dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Penyelenggaraan SAKIP tertuang di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Di dalam SAKIP, seluruh SKPD termasuk Dinas Perhubungan Kota Cirebon diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Untuk periode tahunan, setiap SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Selanjutnya DPA tersebut digunakan sebagai dasar acuan untuk menyusun perjanjian kinerja.

Laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai SKPD dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun setiap akhir tahun.

### **1.2 Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon.

Sedangkan Dasar Hukum pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon adalah Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 95

Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai rincian tugas sebagai berikut

**a. Tugas Pokok**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Daerah di bidang perhubungan.

**b. Fungsi**

1. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

**c. Struktur Organisasi**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sebagai berikut:

**a. Unsur Organisasi**

Unsur organisasi Dinas terdiri dari :

- 1) unsur pimpinan adalah Kepala Dinas;
- 2) unsur staf adalah Sekretaris;
- 3) pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- 4) unsur lini adalah Kepala Bidang;

- 5) pembantu unsur lini adalah kepala Seksi;
- 6) UPT; dan
- 7) pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

b. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari:
  - a. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
  - b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
  - c. Seksi Prasarana Lalu Lintas.
4. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek;
  - b. Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan; dan
  - c. Seksi Terminal dan Multimoda.
5. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan;
  - b. Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
  - c. Seksi Pengendalian dan Operasional.
6. Unit Pelaksana Teknis; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Tugas dan Unsur Organisasi

**A. Kepala Dinas**

1. Tugas pokok

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan.

2. Fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- 2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dinas operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- 3) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 5) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- 6) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

## **B. Sekretariat**

### **1. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Dinas dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dan pelayanan administratif Dinas

### **2. Fungsi**

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian;
- c. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang perhubungan;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;
- g. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- h. Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;

- i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat membawahkan :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencanakerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- c. pengelolaan urusan ketatausahaan;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelola pelaksanaan kerumah tanggaan, perlengkapan, perpustakaan, humas, dan protokol;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

(1) Tugas Pokok

Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/ informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan penyajian bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

(2) Fungsi

- a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang Perhubungan;
- e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas,
- f. penyajian data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- g. penyajian data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Bidang Lalu Lintas**

#### **1. Tugas Pokok**

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan bidang lalu lintas.

#### **2. Fungsi :**

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Lalu Lintas;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Lalu Lintas; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **3. Bidang Lalu Lintas, membawahkan :**

##### **a. Seksi Manajemen Lalu Lintas**

##### **(1) Tugas Pokok**

Seksi Manajemen Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas penyelenggaraan

manajemen lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Manajemen Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Rekayasa Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Rekayasa Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan rekayasa lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan

Bidang lingkup Seksi Rekayasa LaluLintas;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Rekayasa Lalu Lintas, dan
- h pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Prasarana Lalu Lintas

(1) Tugas Pokok

Seksi Prasarana Lalu Lintas sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan prasarana lalu lintas.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana LaluLintas;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Prasarana LaluLintas;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

#### **D. Bidang Angkutan dan Multimoda**

##### **1. Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan angkutan dan multimoda.

##### **2. Fungsi :**

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- c. Pelaksanaan fungsi tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda;

- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

3. Bidang Angkutan dan Multimoda, membawahkan:

a. Seksi Perencanaan Jaringan Trayek

(1) Tugas Pokok

Seksi Perencanaan Jaringan Trayek sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan dalam trayek.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Bidang, lingkup Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek; dan;

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyediaan, Pembinaan dan Pengendalian Angkutan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan

Barang;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang; dan

h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Terminal dan Multimoda

(1) Tugas Pokok

Seksi Terminal dan Multimoda sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan terminal dan multimoda.

(2) Fungsi

a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;

b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda;

c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;

f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Terminal dan Multimoda;

g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Terminal dan Multimoda; dan

- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **E. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana**

##### **1. Tugas Pokok :**

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan keselamatan dan tehnik sarana.

##### **2. Fungsi :**

- a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- b. Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- c. Pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- f. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- g. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana;
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

##### **3. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, membawahkan:**

- a. Seksi Audit dan Inspeksi Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan audit dan investigasi keselamatan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang, lingkup Seksi Audit dan Investigasi Keselamatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

b. Seksi Penyuluhan Keselamatan

(1) Tugas Pokok

Seksi Penyuluhan Keselamatan sebagai pembantu unsur

ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyuluhan keselamatan.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
  - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Penyuluhan Keselamatan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- c. Seksi Pengendalian dan Operasional

(1) Tugas Pokok

Seksi Pengendalian dan Operasional sebagai pembantu unsur lini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengendalian dan operasional.

(2) Fungsi

- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional;
- c. pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Seksi Pengendalian dan Operasional;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Seksi Pengendalian dan Operasional;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang lingkup Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

#### **F. Unit Pelayanan Teknis (UPT)**

- a. UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- b. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

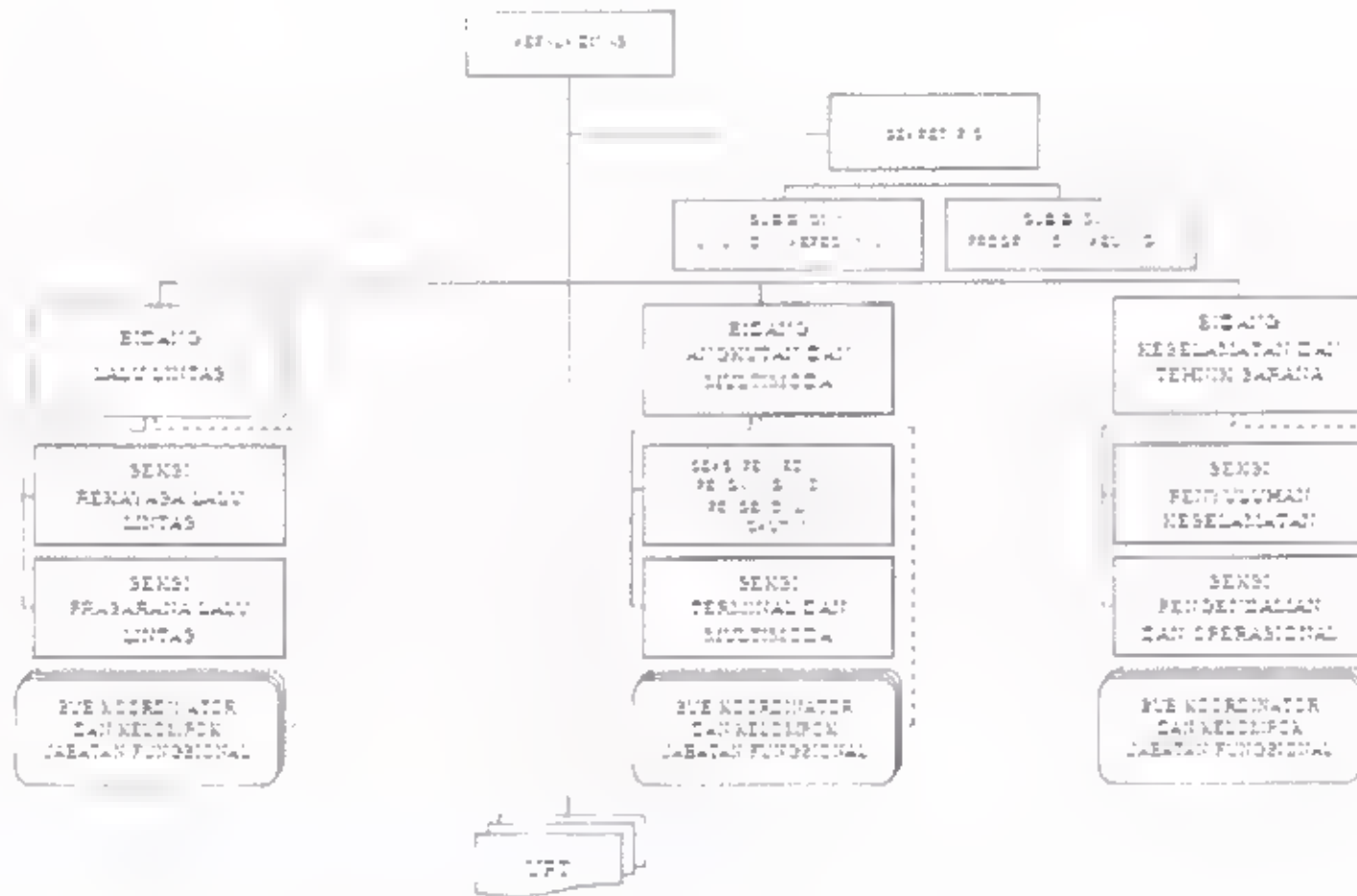
#### **G. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- d. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- e. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- f. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon

### 1.3 Isu – Isu Strategis

Beberapa isu penting di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, diantaranya adalah :

1. Parkir liar di kawasan tertib lalu lintas
2. Pengembangan ATCS;
3. Kewenangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi dan Jalan nasional;
4. Kesemerawutan Lalu Lintas pada ruas - ruas jalan CBD;
5. Perlintasan Kereta Api Sebidang;
6. Angkutan Massal Perkotaan;
7. Subsidi Angkutan Ojek Online pada masa pandemic yang masih belum diselesaikan,
8. Aksesibilitas Transportasi untuk konektivitas di kawasan metropolitan rebana yang masih belum ada kajiannya
9. Pengaturan Perlintasan Angkutan Barang Dalam Kota;
10. Jumlah Penumpang BRT Koridor II yang belum mencapai target
11. Pendapatan Parkir yang terus disorot

### 1.4 Inovasi Dalam Penyelenggaraan Tugas

Inovasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon :

#### 1. UJI KIR GRATIS

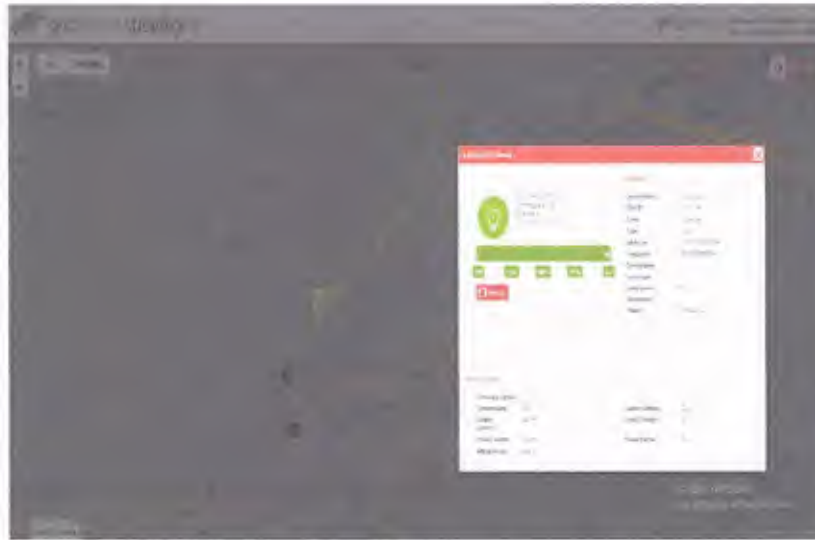
Menurut amanat Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, mulai 01 Januari 2024 Pelayanan Uji KIR Kendaraan Umum sudah tidak dipungut biaya apapun, hal tersebut bertujuan supaya tercapainya Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) Tahun 2024.

#### 2. Smart PJU

Pembaruan penggunaan lampu PJU dengan lampu Light Emitting Diode (LED) dapat memudahkan dalam pengontrolan penggunaan lampu PJU di Kota Cirebon, aplikasi yang digunakan inilah yang dinamakan Smart PJU.

Smart PJU berbentuk website yang hanya dapat di akses oleh Ka UPT PJU Dinas Perhubungan Kota Cirebon, yang berfungsi untuk mengetahui jumlah lampu PJU yang mati dan hidup serta dapat mengontrol daya Lampu PJU di

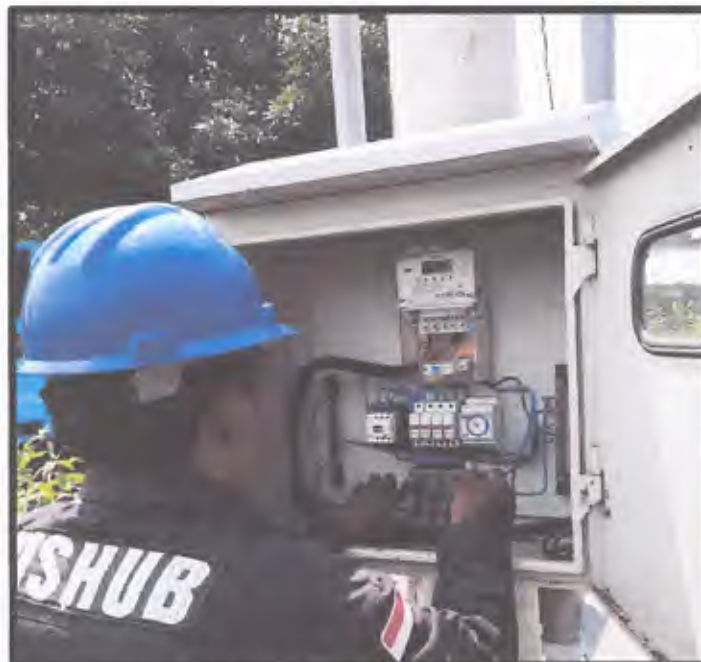
Kota Cirebon sehingga dapat memudahkan UPT PJU dalam memberikan layanan untuk masyarakat.



**Gambar 1.2** Aplikasi Smart PJU

### 3. KWH-Nisasi PJU

KWH-Nisasi PJU dianggarkan setiap tahun minimal 5-10 titik PJU untuk menekan angka pembayaran listrik PJU Kota Cirebon setiap bulannya sehingga berdampak positif pada penghematan tagihan yang mencapai 2-3%. KWH-Nisasi yang sudah berjalan dari tahun 2019 ini sudah mencapai 60% dari jumlah seluruh titik lampu PJU di Kota Cirebon.



**Gambar 1.3** Petugas PJU

### 4. Sistem Informasi Geografis Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Adalah website yang bisa diakses masyarakat untuk mengetahui informasi terkait fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan di ruas jalan Kota Cirebon.

<http://sigflaj.cirebonkota.go.id/>



Gambar 1.4 Tampilan Website SIGFLLAJ

##### 5. ATCS (Area Traffic Control System)

Pengendalian lalu lintas di persimpangan Kota Cirebon secara terpusat pada ruang kendali di Dinas Perhubungan Kota Cirebon melalui CCTV yang terpasang di beberapa persimpangan di Kota Cirebon hanya saja anggaran ATCS di tahun 2024 Cuma sanggup dianggarkan 4 titik ATCS saja sehingga 11 titik ATCS dalam kondisi off. Kami mengupayakan tahun 2026 ATCS Kota Cirebon Harus menjadi ITS sehingga CCTV nya sangat smart bisa untuk analisis data dan merekam secara realtime.



Gambar 1.5 Pantauan lalu lintas melalui ATCS

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk lima tahun ke depan yang disusun untuk menjamin konsistensi pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen dengan perjanjian kinerja yang sudah disepakati berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat Kota Cirebon demi perkuatan landasan program dan kegiatan tahunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari rancangan pembangunan daerah kota Cirebon sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon sejalan dengan rencana pembangunan daerah (RPD) Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026.

Sesuai dengan arah kebijakan Kota Cirebon 2024 - 2026 maka seluruh Perangkat Daerah diarahkan untuk turut serta mensukseskan RPD Kota Cirebon tahun 2024 - 2026, dimana Tujuan Kota Cirebon di RPD 2024-2026 selama 3 tahun adalah

- 1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan
- 2) Meningkatkan potensi, kapasitas dan kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berwibawa;

Dan Dinas Perhubungan Kota Cirebon mengacu pada Tujuan diatas maka yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon terdapat 1 (satu) rumusan Tujuan RPD Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 - 2026 yang ada relevansi dan keterkaitannya Untuk mendapat dukungan

dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu Tujuan ke-1 sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Sasaran dan Indikator**  
**Dinas Perhubungan Kota Cirebon**  
**Tahun 2024**

Sasaran RPD yang diacu	IKU DISHUB	2024
<b>Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berwawasan lingkungan</b>		
Menurunnya Dampak Perubahan Iklim <b>Indikator :</b> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	INDEKS Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55%
	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	74,04

Tabel diatas menjelaskan bahwa apa yang menjadi sasaran dan indikator Dinas Perhubungan Kota Cirebon digunakan untuk mendukung visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Cirebon sehingga dapat berjalan selaras dengan apa yang menjadi Tujuan ke-1 dari RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

## 2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan instrument langkah-langkah dalam perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Perhubungan agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak

diselesaikan namun tetap selaras dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPD dan Kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, IKU, dan Kebijakan

Dinas Perhubungan Kota Cirebon

Tujuan	Sasaran	IKU	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kebijakan kami untuk 2024-2026 mengupayakan penyediaan angkutan perkotaan sampai ke Cirebon Selatan untuk terus dilaksanakan kemudian Kota Cirebon harus terang yang dimana setiap tahun harus ada penambahan titik lampu PJU melalui POKIR, Bankeu maupun DPA. Pada sector lalu lintas, kami standby untuk melaksanakan pemeliharaan perlengkapan jalan demi keselamatan lalu lintas terjamin di Kota Cirebon dan akselerasi kami untuk merencanakan dan menerapkan ITS pada ruas jalan tertentu secara bertahap. Dari sector perparkiran akan terus dilakukan upaya penertiban parkir liar dan peningkatan PAD Parkir untuk mencapai target kinerja.
Indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indikator : Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase Kendaraan yang melaksanakan Uji KIR	

### 2.3 Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Cirebon melalui Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Utama (IKU). Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama**

Sasaran RPD	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Kinerja			Kondisi Akhir RENSTRA
					Tahun 2023	2024	2025	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja ruas jalan yang dinilai selama 1 tahun	50%	55%	65%	70%	70%
		Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji KIR	Jumlah Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji KIR dibagi KBWU Kota Cirebon	56,24%	60%	65%	67%	67%
	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah PD dengan nilai SAKIP sesuai target kota pada tahun berjalan	71,04 Poin	74,04 Poin	74,38 Poin	74,63 Poin	74,63 Poin

## 2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2024 menguraikan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon dengan indikator dan target kinerja yang telah direncanakan dalam dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Cirebon dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan memperhatikan besaran anggaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah disusun maka untuk mewujudkannya hal tersebut dituangkan dalam rencana program dan kegiatan, adapun uraian perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel. 2.4**

**Perjanjian Kinerja DISHUB Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55%
		Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan UJI KIR	60%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	74,04 Poin

## 2.5 Rencana Anggaran

Untuk mendukung keberhasilan dalam pencapaiannya pada tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DISHUB Kota Cirebon tahun 2024 maka di dalam DPA dan DPPA Tahun 2024 kami masih mengampuh 1 Program di Sekretariat dan 1 Program di bidang dan UPT yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), berikut lampiran DPPA Perubahan Tahun 2024 :

KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET
4	5	6	7
RPD Menurunnya Dampak Perubahan iklim	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan : - Dana	Rp 24,677,589,997
		Outcome :	
		- Cakupan layanan administrasi keuangan	100 persen
		- Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan	100 persen
RENSTRA :		- Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100 persen
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana	Rp 248,739,258
Meningkatkan manajemen sumber daya manusia aparatur		Output :	
meningkatkan manajemen keuangan	1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana	Rp 3,700,000
		Output :	
		- Dokumen Renja 2025	1 dokumen
		- Dokumen Renja Perubahan 2024	1 dokumen
	1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana	Rp 1,150,000
		Output :	
		- Dokumen RKA	1 dokumen
	1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan: - Dana	Rp 1,150,000
		Output :	
		- Dokumen RKA Perubahan	1 dokumen
	1.1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan: - Dana	Rp 1,150,000
		Output :	
		- Dokumen DPA	1 dokumen
	1.1.5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Masukan: - Dana	Rp 1,150,000
		Output :	
		- Dokumen DPA Perubahan	1 dokumen
	1.1.6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana	Rp 236,439,256
		Output :	
		- Tenaga Administrasi	12 bulan
		- Laporan Interim Trwulan I, II, III, IV	4 dokumen
		- Laporan Evaluasi Renja Trwulan I, II,	4 dokumen

		III, IV		
1.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan:		
		- Dana	Rp	4,000,000
		Output :		
		- Laporan tahunan BKPPD Tahun 2024		1 dokumen
		- Dokumen Hasil Forum Perangkat Daerah		1 dokumen
		- Laporan LPPD Tahun 2024		1 dokumen
		- Dokumen LKIP Tahun 2024		1 dokumen
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan:		
		- Dana	Rp	13,180,374,362
		Output		
		- Dokumen Administrasi Keuangan		2 jenis
1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan:		
		- Dana	Rp	13,175,319,362
		Output :		
		- Jumlah Laporan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN		12 Laporan
1.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan:		
		- Dana	Rp	5,055,000
		Output :		
		- Dokumen Catatan Laporan Keuangan (CALK)		1 dokumen
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan:		
		- Dana	Rp	164,002,720
		Output :		
		- Dokumen Administrasi Keuangan		1 jenis
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan:		
		- Dana	Rp	164,002,720
		Output :		
		- Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya		4 Paket
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan:		
		- Dana	Rp	362,442,819
		Output :		
		- Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		8 Jenis
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Masukan:		
		- Dana	Rp	39,379,319
		Output :		
		- Alat Tulis Kantor		5 Paket
1.4.2	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan:		
		- Dana	Rp	123,076,000
		Output :		
		- Harien surat kabar		12 bulan
1.4.3	Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan:		
		- Dana	Rp	146,512,400
		Output :		

		-	Dokumen Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
1.4.4	Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik kantor	Masukan:		
		-	Dana	Rp 12,700,800
		Output :		
		-	Jumlah Paket logistik yang disediakan	3 Paket
1.4.5	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Masukan:		
		-	Dana	Rp 29,823,700
		Output :		
			Barang cetakan	11 jenis
		-	Penggandaan	51956 lembar
1.4.6	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Masukan:		
		-	Dana	Rp 10,948,600
		Output :		
		-	Laporan	12 Laporan
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan:		
		-	Dana	Rp 501,396,000
		Output :		
		-	Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jenis
1.5.1	Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan:		
		-	Dana	Rp 501,396,000
		Output :		
		-	Kendaraan Dinas Operasional	2 Unit
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan:		
		-	Dana	Rp 9,736,081,700
		Output :		
		-	Dokumen Penyediaan jasa Penunjang Urusan pemerintahan daerah	2 Jenis
1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan:		
		-	Dana	Rp 8,864,712,000
		Output :		
		-	Struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM)	36 Jenis
		-	Struk pembayaran tagihan rekening telepon	12 Jenis
		-	Struk pembayaran tagihan rekening TV Satelit	36 Jenis
		-	Struk pembayaran tagihan rekening listrik	36 Jenis
1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan:		
		-	Dana	Rp 871,369,700
		Output :		
			Petugas/Tenaga pengamanan	15 orang
			Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	1 jenis
			Petugas/ Tenaga kebersihan kantor	8 orang
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan:		
		-	Dana	Rp 464,553,140

		Output :	
		- Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 jenis
1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan:	
		- Dana	Rp 41,226,500
		Output :	
		- BBM Kendaraan R4	12 Bulan
		- Pelumas Kendaraan R4	5 kali
		- Servis Kendaraan R4	5 kali
		- Suku cadang Kendaraan R4	5 kali
		- STNK/SKPD PKB R4	1 Unit
1.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Personan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan:	
		- Dana	Rp 312,627,900
		Output :	
		- STNK/SKPD PKB pick up dan Truk	4 Unit
		- STNK/SKPD PKB R2	32 Unit
		- STNK/SKPD PKB R3	3 Unit
		- STNK/SKPD PKB R4	8 Unit
		- BBM Kendaraan R2	32 Unit
		- BBM Kendaraan R3	1 Unit
		- BBM Kendaraan R4	8 Unit
		- BBM Kendaraan R6	3 Unit
		- Pelumas Kendaraan R2	32 Unit
		- Pelumas Kendaraan R3	1 Unit
		- Pelumas Kendaraan R4	8 Unit
		- Pelumas Kendaraan R6	3 Unit
		- Servis Kendaraan R2	32 Unit
		- Servis Kendaraan R3	2 Unit
		- Servis Kendaraan R4	8 Unit
		- Servis Kendaraan R6	3 Unit
		- Suku Cadang Kendaraan R2	32 Unit
		- Suku Cadang Kendaraan R3	3 Unit
		- Suku Cadang Kendaraan R4	8 Unit
		- Suku Cadang Kendaraan R6	3 Unit
1.7.3	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan:	
		- Dana	99,997,640
		Output :	
		- Gedung kantor	1 jenis
1.7.4	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan:	
		- Dana	Rp 9,725,100
		Output :	
		- Peralatan Kantor	3 jenis
1.7.5	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan:	
		- Dana	Rp 20,975,000
		Output :	
		- Perlengkapan Kantor	3 jenis
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Masukan:	
		- Dana	Rp 4,442,661,290
		Outcome :	

			- Meningkatkan Pelayanan Kapasitas Jalan (Rata-Rata VC Ratio Seluruh Ruas Jalan Kota Cirebon)	100 persen
			- Bertambahnya Tiik PJU	100 persen
			- Bertambahnya Jumlah Lokasi Parkir yang dikelola	100 persen
			Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas	100 persen
			- Meningkatkan Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen
			- Meningkatkan Pelayanan Angkutan Umum	100 persen
	2.1	Kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Masukan:	
			- Dana	Rp 899,625,968
			Output :	
			- Dokumen penyediaan perlengkapan jalan	3 jenis
	2.1.1	Sub kegiatan Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Masukan:	
			- Dana	-
			Output :	
			- Pengadaan parkir sepeda	0 Unit
	2.1.2	Sub kegiatan Penyediaan Perengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Masukan:	
			- Dana	Rp 668,572,340
			Output :	
			- Pemeliharaan PJU	8094 titik
	2.1.3	Sub kegiatan Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Masukan:	
			- Dana	Rp 231,053,628
			Output :	
			- Lokasi rambu lalu lintas yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	72 titik
			- pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	12 Laporan
			- Lokasi traffic light yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	32 titik simpang
	2.3	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Masukan:	
			- Dana	Rp 224,668,970
			Output :	
			- Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 jenis
	2.3.1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Peningkatan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Masukan:	
			- Dana	0
			Output :	
			- Dokumen Perizinan Parkir	0 laporan
	2.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Masukan:	

	Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	- Dana	Rp 224,869,970
		Output :	
		- Laporan Pengawasan dan Pengendalian Parkir di kota Cirebon	12 laporan
		Karcis Parkir	3 jenis
2.4	Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Masukan:	
		- Dana	Rp 566,272,352
		Output :	
		Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Laporan
2.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan:	
		- Dana	Rp 76,811,720
		Output :	
		- BBM dan Oli Genset	12 Bulan
		- Tab	3 unit
2.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan:	
		- Dana	Rp 287,994,600
		Output :	
		- Bukti lulus Uji Smart Card	2 jenis
2.4.3	Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan:	
		- Dana	Rp 69,398,500
		Output :	
		- Service Alat Uji	9 unit
2.4.4	Sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Masukan:	
		- Dana	Rp 132,067,532
		Output :	
		- Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Laporan
2.5	Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Masukan:	
		- Dana	Rp 749,521,100
		Output :	
		- Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas	3 Jenis
2.5.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pemasangan Perbaikan Pemeliharaan Perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Masukan:	
		- Dana	Rp 338,273,000
		Output :	
		- Pengadaan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	3 Lokasi
2.5.2	Sub Kegiatan Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan Kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Masukan:	
		- Dana	Rp 401,648,100
		Output :	

		-	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	1 tahun
		-	Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Angkutan Umum	2 kali
		-	Personil Pelayanan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru	3 kali
	2.5.3	Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	Masukan:	
			- Dana	Rp 9,600,000
			Output :	
			- Laporan Forum	3 laporan
	2.6	Kegiatan Audit dan Keselamatan LLAJ di Jalan	Masukan:	
			- Dana	Rp 26,873,000
			Output :	
			- Dokumen Audit dan Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Dokumen
	2.6.1	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Masukan:	
			- Dana	0
			Output :	
			- Laporan Forum	0 Laporan
	2.6.2	Sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor kabupaten/kota	Masukan:	
			- Dana	Rp 26,873,000
			Output :	
			- Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban bertalu lintas di jalan	50 orang
			- Terselenggaranya bimbingan teknis keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	1 kali
	2.7	Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Masukan:	
			- Dana	Rp 1,900,000,000
			Output :	
			- Dokumen penyediaan angkutan umum	1 jenis
	2.7.1	Sub kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Masukan:	
			- Dana	Rp 1,900,000,000
			Output :	
			- Trayek BRT Kota Cirebon	1 lintasan trayek
	2.8	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan:	
			- Dana	Rp 75,498,900
			Output :	
			- Dokumen Perizinan	1 jenis

2.8.1	Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Masukan:	
		- Dana	Rp. 75,498,900
		Output :	
		- Evaluasi Penyelenggaraan BRT	4 laporan
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 29.120.251.287</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 disusun dalam rangka menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan selama tahun 2024 sebagai pelaksanaan amanah yang diemban organisasi. Isi dari akuntabilitas kinerja tersebut merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan penjabarannya, penjelasan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Perhubungan.

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam proses pengukuran capaian kinerja ini perlu diperhatikan asas pertimbangan biaya, manfaat, efisiensi dan efektivitas.

##### 3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024-2026, perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Tujuan RPD Kota Cirebon tahun 2024-2026. Terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu : **Tujuan ke-1 “Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.”**

Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon yaitu:

- 1) Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2) Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji KIR

### 3) Nilai capaian evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Hal ini merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan sasaran indicator dari tujuan RPD Kota Cirebon Tahun 2024-2026 yang pada IKU pertama untuk menilai kinerja lalu lintas di Kota Cirebon, kemudian IKU kedua untuk menilai kinerja lingkungan dari segi kualitas udara kota Cirebon sehingga diambil dari pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan IKU yang ketiga terkait nilai capaian evaluasi SAKIP perangkat daerah sebagai bagian dari penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah, berikut capaian realisasi dari setiap IKU di Tahun 2024

**Tabel 3.1**

**Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama DISHUB Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	2	3	4	5	6
1	Menurunnya Dampak Perubahan Iklim	Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55%	53%	96,37%
		Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan UJI KIR	60%	58,12%	96,87%
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	74,04 Poin	76,25%	102,98%
<b>Rata-rata</b>					<b>98,74%</b>

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indicator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya di dapat angka rata-rata yaitu **98,74%**.

#### 3.1.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Di sub bagian ini akan dijelaskan mengenai pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja pada sasaran yang dimiliki Dinas Perhubungan pada Tahun 2024. Evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan / beberapa tahun yang lalu. Selain

itu juga evaluasi kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

**IKU 1 : "INDEKS PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya titik rawan kemacetan lalu lintas dengan 1 indikator mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dengan predikat sangat berhasil. Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**

**DATA VC RATIO RUAS JALAN DI KOTA CIREBON  
TAHUN 2024**

NO	NAMA SEGMENT	V/C RATIO	KECEPATAN JAM SIBUK (KM/JAM)	LOS VC RATIO	STATUS	FUNGSI JALAN
1	MAYOR SASTRA ATMAJA	0.3	31	A	KOTA	LOKAL
2	PANCURAN	0.68	29	A	KOTA	LOKAL
3	RARASANTANG	0.3	28	A	KOTA	LOKAL
4	SUKALILA	0.67	28	A	KOTA	LOKAL
5	JL KESEPUHAN	0.45	51.2	B	PROVINSI	KOLEKTOR
6	JL MERDEKA	0.81	35.2	B	PROVINSI	KOLEKTOR
7	JL SILIWANGI 2	0.45	48.1	B	KOTA	KOLEKTOR
8	JL GUDANG	0.48	50	B	KOTA	KOLEKTOR
9	JL PASUKETAN 1	0.72	54.4	B	KOTA	KOLEKTOR
10	JL SYARIF ABDUR RAHMAN	0.48	53	B	KOTA	KOLEKTOR
11	AMPERA RAYA	0.74	28	B	KOTA	LOKAL
12	BAHAGIA	0.54	31.9	B	KOTA	LOKAL
13	DR SUTOMO	0.56	32	B	KOTA	LOKAL
14	GALUNGGUNG	0.65	32	B	KOTA	LOKAL
15	GARUDA	0.64	30	B	KOTA	LOKAL

16	GN MERAPI	0.51	29	B	KOTA	LOKAL
17	JAGASATRU 4	0.65	30	B	KOTA	LOKAL
18	KB DANIS	0.67	25	B	KOTA	LOKAL
19	LEMAHWUNGKUK	0.66	31	B	KOTA	LOKAL
20	M THOHA	0.56	37	B	KOTA	LOKAL
21	MERBABU	0.57	33	B	KOTA	LOKAL
22	PEGAJAHAN	0.83	29	B	KOTA	LOKAL
23	PERUMNAS-DK SEMAR	0.69	29	B	KOTA	LOKAL
24	PRAMUKA PENGGALANG	0.7	31	B	KOTA	LOKAL
25	PRONGGOL	0.23	30	B	KOTA	LOKAL
26	RINJANI	0.84	28	B	KOTA	LOKAL
27	STADION BIMA 3	0.54	30	B	KOTA	LOKAL
28	SUNYARAGI	0.61	20	B	KOTA	LOKAL
29	TANJUNG	0.71	27	B	KOTA	LOKAL
30	TERMINAL-DK SEMAR	0.57	29	B	KOTA	LOKAL
31	GRAGE	0.42	40	B	KOTA	LOKAL
32	STADION BIMA 1	0.73	31	B	KOTA	LOKAL
33	STADION BIMA 2	0.71	32	B	KOTA	LOKAL
34	TERUSAN PEMUDA 1	0.73	27	B	KOTA	LOKAL
35	TERUSAN PEMUDA 2	0.71	28	B	KOTA	LOKAL
36	KEBON CAI	0.58	28	B	KOTA	LOKAL
37	PAGONGAN	0.83	28	B	KOTA	LOKAL
38	JL CEMARA	0.58	45	C	NASIONAL	ARTERI
39	JL VETERAN	0.85	47	C	NASIONAL	ARTERI
40	JL AHMAD YANI 1	0.64	63	C	NASIONAL	ARTERI
41	JL AHMAD YANI 2	0.57	62	B	NASIONAL	ARTERI
42	JL AHMAD YANI 3	0.63	60	C	NASIONAL	ARTERI
43	JL AHMAD YANI 4	0.62	64.2	C	NASIONAL	ARTERI
44	JL BRIGJEN DHARSONO 4	0.59	63	C	NASIONAL	ARTERI
45	JL KALIJAGA 1	0.44	64.2	C	NASIONAL	ARTERI
46	JL SLAMET RIYADI	0.65	43.2	C	NASIONAL	ARTERI

47	JL BENTENG	0.62	63.7	C	NASIONAL	ARTERI
48	JL DIPONEGORO	0.48	63.1	C	NASIONAL	ARTERI
49	JL KALIJAGA 2	0.62	62.32	C	NASIONAL	ARTERI
50	JL KAPTEN SAMADIKUN	0.68	45.3	C	NASIONAL	ARTERI
51	JL KARTINI	0.92	45.2	D	KOTA	ARTERI
52	JL KESUNEAN	0.54	43.5	C	NASIONAL	ARTERI
53	JL PILANG RAYA	0.63	65.2	C	NASIONAL	ARTERI
54	JL SILIWANGI 1	0.45	53.7	C	NASIONAL	ARTERI
55	JL SISINGAMANGARAJA	0.78	63	C	NASIONAL	ARTERI
56	JL CIREMAI RAYA 1	0.78	30.1	C	KOTA	KOLEKTOR
57	JL CIREMAI RAYA 2	0.82	30	C	KOTA	KOLEKTOR
58	JL TENTARA PELAJAR	0.78	48.1	C	KOTA	KOLEKTOR
59	JL KESAMBI 5	0.33	27.22	C	PROVINSI	KOLEKTOR
60	JL ARIODINOTO	0.42	50.2	C	PROVINSI	KOLEKTOR
61	JL JENDERAL SUDIRMAN 2	0.66	63.4	C	PROVINSI	KOLEKTOR
62	JL KALI TANJUNG 3	0.54	55.8	C	PROVINSI	KOLEKTOR
63	JL KALITANJUNG 1	0.63	37	C	PROVINSI	KOLEKTOR
64	JL KALITANJUNG 2	0.73	57.4	C	PROVINSI	KOLEKTOR
65	JL KEBUMEN	0.61	53.3	C	KOTA	KOLEKTOR
66	JL KESAMBI 3	0.49	42.2	C	PROVINSI	KOLEKTOR
67	JL KESAMBI 4	0.3	43.5	C	PROVINSI	KOLEKTOR
68	JL PULASAREN	0.37	44.6	C	PROVINSI	KOLEKTOR

69	JL KARANG GETAS 1	0.38	16.8	C	KOTA	KOLEKTOR
70	JL KARANG GETAS 2	0.78	15.7	C	KOTA	KOLEKTOR
71	JL LAWANG GADA	0.61	23.5	C	PROVINSI	KOLEKTOR
72	JL NYI MAS GANDA SARI 1	0.28	42.1	C	PROVINSI	KOLEKTOR
73	JL NYI MAS GANDA SARI 2	0.53	43.2	C	PROVINSI	KOLEKTOR
74	JL P SURYA NEGARA	0.48	42.2	C	KOTA	KOLEKTOR
75	JL PARUJAKAN 1	0.48	40.3	C	KOTA	KOLEKTOR
76	JL PARUJAKAN 2	0.22	45.3	C	KOTA	KOLEKTOR
77	ANGKASA RAYA	0.8	37	C	KOTA	LOKAL
78	DUKUH SEMAR 1	0.48	38	C	KOTA	LOKAL
79	DUKUH SEMAR 2	0.46	39	C	KOTA	LOKAL
80	ELANG RAYA	0.87	37	C	KOTA	LOKAL
81	JAGASATRU 2	0.85	32	C	KOTA	LOKAL
82	KALIBARU	0.32	31	C	KOTA	LOKAL
83	KARANG MULYA	0.32	36	C	KOTA	LOKAL
84	KARYA BHAKTI	0.2	35	C	KOTA	LOKAL
85	KOPI LUHUR	0.27	32	C	KOTA	LOKAL
86	KS TUBUN	0.32	29	C	KOTA	LOKAL
87	PANGERAN DRAJAT 2	0.71	50	C	KOTA	LOKAL
88	PANGERAN DRAJAT 3	0.63	27	C	KOTA	LOKAL
89	PEKALANGAN	0.62	30	C	KOTA	LOKAL
90	PELABUHAN	0.39	31	C	KOTA	LOKAL
91	PRAMUKA	0.38	34	C	KOTA	LOKAL
92	SALADARA	0.71	32	C	KOTA	LOKAL
93	JAGASATRU 3	0.78	29	C	KOTA	LOKAL
94	DR CIPTO 1	0.71	29	C	KOTA	LOKAL
95	DR CIPTO 2	0.59	45	B	KOTA	LOKAL
96	DR CIPTO 3	0.72	34	C	KOTA	LOKAL

97	DR CIPTO 4	0.75	27	C	KOTA	LOKAL
98	DR CIPTO 5	0.65	30	C	KOTA	LOKAL
99	DR SUDARSONO	0.11	38	C	KOTA	LOKAL
100	MAJASEM	0.35	40	C	KOTA	LOKAL
101	PERJUANGAN 1	0.54	32	C	KOTA	LOKAL
102	KANTOR	0.23	32	C	KOTA	LOKAL
103	PANDESAN	0.36	26	C	KOTA	LOKAL
104	PANJUNAN	0.32	28	C	KOTA	LOKAL
105	PETRATEAN	0.7	27.5	C	KOTA	LOKAL
106	WINAON	0.51	31	C	KOTA	LOKAL
107	PERJUANGAN 2	0.57	26	C	KOTA	LOKAL
108	PERJUANGAN 3	0.59	27	C	KOTA	LOKAL
109	EVAKUASI	0.38	31	D	KOTA	LOKAL
110	PEMUDA	0.64	42	D	KOTA	LOKAL
111	JL BRIGJEN DHARSONO 1	0.27	62.1	C	NASIONAL	ARTERI
112	JL BRIGJEN DHARSONO 2	0.65	61.4	C	NASIONAL	ARTERI
113	JL BRIGJEN DHARSONO 3	0.37	60.3	C	NASIONAL	ARTERI
114	JL PASINDANGAN	0.52	43	D	NASIONAL	ARTERI
115	JL YOS SUDARSO	0.61	63.23	C	NASIONAL	ARTERI
116	JL RAJAWALI RAYA 1	0.79	40.2	D	KOTA	KOLEKTOR
117	JL RAJAWALI RAYA 2	0.81	41	D	KOTA	KOLEKTOR
118	JL JENDERAL SUDIRMAN 1	0.85	65.1	D	PROVINSI	KOLEKTOR
119	JL KANGGRAKSAN	0.87	55.9	D	PROVINSI	KOLEKTOR
120	JL KESAMBI 2	0.21	45.3	D	PROVINSI	KOLEKTOR
121	JL PASUKETAN 2	0.3	35.3	D	KOTA	KOLEKTOR
122	JL PEKALIPAN	0.26	33.5	D	KOTA	KOLEKTOR

123	JL PEKIRINGAN 1	0.75	28.2	D	KOTA	KOLEKTOR
124	JL PEKIRINGAN 2	0.77	23.3	D	KOTA	KOLEKTOR
125	JAGASATRU 1	0.87	30	D	KOTA	LOKAL
126	KESAMBI DALAM	0.77	36.4	D	KOTA	LOKAL
127	PANGERAN DRAJAT 1	0.67	29	D	KOTA	LOKAL
128	WAHIDIN 1	0.83	38	D	KOTA	LOKAL
129	WAHIDIN 2	0.43	37.1	D	KOTA	LOKAL
130	JL TUPAREV	0.88	43	E	NASIONAL	ARTERI
131	JL KESAMBI 1	0.76	47.4	E	PROVINSI	KOLEKTOR
132	KUTAGARA 1	0.88	25	E	KOTA	LOKAL
133	KUTAGARA 2	0.82	26	E	KOTA	LOKAL
134	JALAN KEMBANG	0.72	48	D	KOTA	LOKAL
135	JALAN KATIASA	0.47	40	D	KOTA	LOKAL
136	JALAN KEDUNG MENJANGAN	0.38	50	C	KOTA	LOKAL
137	JALAN KEDUNG KRISIK	0.32	45	C	KOTA	LOKAL
138	JALAN SURAPANDAN I - II	0.41	52.3	C	KOTA	LOKAL
139	JALAN KEDUNG MENDENG	0.45	47	C	KOTA	LOKAL
140	TAMAN KALIJAGA PERMAI	0.38	45	C	KOTA	LOKAL
141	JALAN PENGGUNG PRAMUKA	0.58	45	D	KOTA	ARTERI
142	JALAN GRENJENG SMPN 17	0.48	48	C	KOTA	LOKAL
143	JALAN KEDUNG JUMBLENG	0.23	53	B	KOTA	LOKAL
144	JALAN CADAS NGAMPAR	0.24	45	B	KOTA	LOKAL
145	JALAN CIBOGO	0.28	48	B	KOTA	LOKAL

146	JALAN SUMUR WUNI POMPES BENDA	0,27	52	B	KOTA	LOKAL
147	JALAN ARGASUNYA	0,41	34	C	KOTA	LOKAL
148	JALAN PENGGUNG RAYA	0,72	40	D	KOTA	LOKAL
149	JALAN PETIREMAN	0,44	53	B	KOTA	LOKAL
150	JALAN KERTA SAMBOJA	0,37	43	B	KOTA	LOKAL
151	JALAN ADE IRMA	0,57	45	C	KOTA	LOKAL
152	JALAN PALANG MERAH	0,42	42	C	KOTA	LOKAL
153	JALAN PEGADAIAN	0,42	46	C	KOTA	LOKAL
154	JALAN BUYUT	0,49	48	C	KOTA	LOKAL
155	JALAN PENGAMPON	0,44	42	C	KOTA	LOKAL
156	JALAN KENDURUAN	0,31	42	B	KOTA	LOKAL
157	JALAN CITRALAND	0,42	55	B	KOTA	LOKAL
158	JALAN GAMBIRLAYA	0,18	54	B	KOTA	LOKAL
159	JALAN TALANG	0,54	43	B	KOTA	LOKAL
160	JL SYARIF ABDURRAHMAN	0,33	45	B	KOTA	LOKAL
161	JL KAYUWALANG	0,58	43	B	KOTA	LOKAL
162	JL SWASEMBADA	0,36	42	B	KOTA	LOKAL
163	JALAN PELANDAKAN	0,78	32	D	KOTA	LOKAL
	<b>TOTAL VC RATIO</b>	<b>90,79</b>				
	<b>RATA VC RATIO</b>	<b>0,55</b>				

**Rerataan VC Ratio =  $\Sigma$  Jumlah VC Ratio Sampel Ruas Jalan Di Kota Cirebon**

**163 Sampel Ruas Jalan Di Kota Cirebon**

$$= \frac{90,79}{163}$$

$$= 0.55$$

Dari data penelitian lapangan Tahun 2024 dengan titik locus sebanyak 163 sampel ruas jalan didapat VC Ratio tertinggi terdapat di Jalan Kartini sebesar 0,92 sepanjang TL Gunung Sari – Perlintasan Rel Kereta Api – TL Kejaksan pada pagi hari dan sore hari saja. Kemudian Ruas jalan yang sangat lengang terdapat di Jalan Gambirlaya dengan VC Ratio sebesar 0,18, Jalan Kedung Jumleng dan Jalan Cadas Ngampar yang masing masing VC Ratio-nya 0,23 dan 0,24 dengan kecepatan akselerasi kendaraan dikisaran 50-55 km/jam. Dari hasil perhitungan Rata-Rata VC Ratio ruas jalan di Kota Cirebon didapat angka 0.55 yang artinya sangat tinggi, dan laju kendaraan berkisar 45 km/jam secara rata rata. Namun, Titik kemacetan terjadi bilamana mobilitas tinggi pada saat periode jam tertentu saja yang artinya waktu kesibukan setiap harinya ada pada periode 16 jam dan 8 jam sisa relatif lengang tanpa hambatan berarti. dengan VC ratio 0,15 – 0,20 dengan kecepatan akselerasi sebesar 60 km/jam pada seluruh ruas jalan di Kota Cirebon termasuk Jalan Protokol nya Kota Cirebon

Tabel 3.3

Tingkat Pelayanan Jalan atau *Level of Service* (LOS)

Tingkat Pelayanan Jalan	Karakteristik Lalu Lintas	Q/C
A	Kondisi arus lalu lintas bebas dengan kecepatan tinggi dan volume lalu lintas rendah	0,00-0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas.	0,20-0,44
C	Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan.	0,45-0,74
D	Arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dapat dikendalikan, V.C Ratio masih dapat ditolerir	0,75-0,84
E	Arus tidak stabil, kecepatan terkadang terhenti, permintaan sudah mendekati kapasitas	0,85-1
F	Arus dipaksakan, kecepatan rendah, volume di atas kapasitas, antrian panjang (macet)	$\geq 1,00$

Ada berbagai macam kegiatan yang menjadi katalis positif di dalam pencapaian target indikator kinerja Utama yaitu :

1. Penertiban kawasan perparkiran di beberapa ruas jalan di kota Cirebon untuk mengurangi faktor hambatan samping sebagai pemicu kemacetan di ruas jalan dan penyempitan lajur (Bottle Neck). Kemudian kawasan parkir di wilayah pasuketan, karanggetas, pekalangan dan pertokohan lain menjadi penyumbang tingginya hambatan samping di wilayah tersebut dan kami melakukan upaya penertiban 2 kali dalam seminggu per 5 titik parkir sehingga parkir di badan jalan menjadi tertib dan tidak melewati batas marka parkir di badan jalan.



Gambar 3.1 Pengendalian Parkir di Ruas Jalan

2. Perbaiki lampu penerangan jalan umum oleh Tim PJU yang selalu stanby 24 jam untuk monitoring di lapangan guna melakukan perbaikan dan pemeliharaan fasilitas PJU, selama tahun 2024 UPT PJU berhasil merealisasikan pemeliharaan PJU sebanyak 8049 titik lampu dan realisasi 2 POKIR DPRD untuk pemasangan lampu PJU sebanyak 25 titik lampu berhasil diselesaikan.

Tabel 3.3 Daftar Realisasi Kinerja UPT PJU

Uraian	Realisasi
Jumlah Pemeliharaan Perbaikan Lampu PJU selama Tahun 2024	8049 Titik Lampu
Jumlah Penambahan Lampu PJU Berdasarkan Aspirasi POKIR Tahun 2024	30 Titik Lampu
Jumlah KWH-Nisasi PJU yang sudah dilaksanakan di Tahun 2024	5 Unit





Gambar 3.2 Perbaikan Lampu Penerangan Jalan Umum oleh Tim PJU

3. Adanya giat 68 yang dilakukan untuk mengawasi dan melakukan pengaturan arus lalu lintas pada ruas jalan dan simpang bersinyal di Kota Cirebon berhasil membantu peningkatan kinerja lalu lintas pada peak hour di pagi hari terutama pada simpang tanpa APILL yang sangat diperlukan petugas untuk menguraikan kemacetan yang terjadi.



Gambar 3.3 Giat Pengaturan Lalu Lintas

Kegiatan Pengaturan Pengaturan dan Pengendalian Lalu lintas juga dilaksanakan pada kegiatan event berskala nasional, regional maupun

local untuk mengendalikan lalu lintas yang terdampak pada suatu event. Misalnya di Tahun 2024 ada kegiatan event gowes dan running yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tuannya rumahnya Kota Cirebon personil DISHUB siap stanby di lapangan untuk menjaga lintasan yang dilewati oleh peserta. Kemudian event konser yang diselenggarakan di Kota Cirebon kami menugaskan 5 sampai 10 personil untuk pengamanan lalu lintas dan pengaturan perparkiran di kawasan event yang sedang berlangsung. Jadi, semua event bisa terselenggarakan karena harus ada izin dari Dinas Perhubungan sehingga feedback dari kami untuk menganalisis seberapa besar dampak dari event tersebut terhadap kinerja lalu lintas sehingga akan kami kirimkan sejumlah personil untuk mengendalikannya. Tanpa izin dari kami, suatu event tidak bisa diselenggarakan.

4. Pelaksanaan Kegiatan pengaturan lalu lintas dan angkutan pada periode hari raya lebaran, natalan dan tahun baru dengan mengerahkan 65 orang personil untuk berjaga di posko selama 16 hari. Kami menyediakan 1 posko induk selama periode lebaran dan nataru. Kemudian kami menempatkan 2 orang petugas pada posko gabungan yang tersebar di beberapa titik di kota Cirebon. Kami juga memproduksi data volume lalu lintas harian selama 16 hari pada periode lebaran dengan tenaga survey sebanyak 8 orang.

Tabel 3.4 Laporan Volume Lalu Lintas Selama Periode Lebaran Tahun 2024

Jumlah Hari Pelaksanaan Perhitungan	Motor (R2)	Mobil Pribadi (R4)	Angkutan Umum	Total
16 Hari	1.044.449	144.191	50.251	1.238.891

Grafik 1.1 Perbandingan Jumlah Kendaraan Dari Tahun 2022-2024 Periode Lebaran



Grafik tersebut secara langsung menggambarkan bahwa kami bahwa pengendalian lalu lintas sudah dilaksanakan sesuai habit dan pilihan para pemudik terkait waktu keberangkatan dan pilihan moda angkutan lebaran

sehingga pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi berkurang selama 3 tahun terakhir.

5. Pemeliharaan Lampu APILL pada ruas jalan dan simpang – simpang yang ada di Kota Cirebon



Gambar 3.5 Perbaikan Lampu APILL

6. Kegiatan pengamanan Angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru (NATARU) Tahun 2024 dengan mengerahkan personil sebanyak 65 orang yang terbagi menjadi 2 shift



Gambar 3.6 Pelaksanaan Angkutan Lebaran dan NATARU

7. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan pengguna jalan pada saat melintasi perlintasan rel sebidang guna menekan terjadinya kecelakaan antara kendaraan bermotor dan kereta api yang dilaksanakan setiap 4 kali dalam setahun pada setiap perlintasan yang ada di Kota Cirebon



Gambar 3.7 Sosialisasi Keselamatan Pengguna Jalan

8. Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk membahas permasalahan teknis maupun non teknis bidang perhubungan yang ada di Kota Cirebon dengan instansi lainnya yang dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama 1 tahun. Penyelenggaraan Forum dilaksanakan menjelang periode angkutan lebaran tahun 2024, kemudian di bulan Juni, September dan Desember Tahun 2024



Gambar 3.8 Forum LLAJ

9. Pelaksanaan bantuan social kepada driver ojek online dan pengemudi angkutan kota akibat dampak pandemic tahun 2020 yang penyerahannya dilaksanakan secara simbolis oleh Pj. Wali Kota di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cirebon.



Gambar 3.9 Acara Bansos Ojek Online

10. Pemeliharaan perlengkapan jalan yang dilaksanakan di Triwulan ke IV terdiri atas pemeliharaan dan pengecatan marka jalan yang berlangsung di 3 lokasi yaitu Jalan Siliwangi, Jalan Pemuda dan Jalan Majasem Perjuangan



Gambar 3.10 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

11. Studi Banding Pelaksanaan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta sebagai tindaklanjut upaya peningkatan pelayanan transportasi massal BRT di Kota Cirebon dan ingin meniru teknologi perhubungan yang sudah digunakan di Surakarta untuk diterapkan di kota Cirebon semisal integrated Teknologi system (ITS) untuk monitoring dan pengendalian kinerja lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi sehingga analisisnya bisa langsung keluar.





Gambar 3.11 Studi Banding di Kota Yogya dan Surakarta

12. Giat Penertiban Parkir liar di Kawasan Tertib Lalu Lintas di depan CSB yang dimulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan penindakan parkir yang berkolaborasi dengan Kepolisian, pihak CSB dan Perangkat daerah yang mendukung kinerja ketertiban.



Gambar 3.12 Penertiban parkir liar di depan CSB

13. Kegiatan DISHUB MENYAPA untuk sosialisasi keselamatan lalu lintas dalam berkendara kepada peserta didik/pelajar di tingkat SMP dan SMA di Kota Cirebon



Gambar 3.13 Kegiatan DISHUB MENYAPA

14. Sosialisasi ujicoba E-Parkir di Kawasan Karanggetas dan Pasuketan untuk melihat potensi pendapatan harian dari perparkiran di wilayah tersebut.





Gambar 3.14 Kegiatan Ujicoba E-Parkir

15. Giat 68 yang dilaksanakan setiap hari yang dilakukan dengan menempatkan petugas DISHUB disetiap persimpangan yang rawan kemacetan lalu lintas dan pengaturan lalu lintas pada event event besar yang diselenggarakan di Kota Cirebon.



Gambar 3.15 Kegiatan DALOPS

16. Pengaturan rekayasa lalu lintas pada saat periode lebaran guna memperlancar kondisi lalu lintas di sepanjang jalan by pass



Gambar 3.16 Rekayasa Lalu Lintas

17. Pelaksanaan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) yang berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT. KAI DAOP 3





Gambar 3.17 Kegiatan SALUD

**Sasaran 1 : "Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan"**

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 untuk IKU ke 2 tentang Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan Uji KIR Tahun 2024 sebagai bentuk dukungan untuk menyokong sasaran kinerja Kota Cirebon tentang penurunan Dampak Perubahan Iklim, berikut realisasi kegiatan dari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2024 :

**Tabel 3.5**  
**Capaian IKU 2 Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Uji KIR Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Kondisi Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan UJIR	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
Persentase Kendaraan Bermotor yang Melaksanakan Uji KIR	56,1%	58,12%	11.869	60%	65%	67%

Capaian sasaran dari IKU ke-2 untuk menyokong indikator yang berkaitan penurunan dampak perubahan iklim terealisasi sebanyak 11.869 kendaraan yang melaksanakan Uji KIR dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Detail Rincian Realisasi Kinerja UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2024**

NO	URAIAN	JUMLAH (UNIT)
1	DATA KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI (KBWU)	10.212
2	DATA KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PER JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2024	11.869
3	DATA KENDARAAN YANG LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR	11.801
4	DATA KENDARAAN TIDAK LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR	68
5	PERSENTASE KENDARAAN YANG LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR	99,42%
6	PERSENTASE KENDARAAN YANG TIDAK LULUS UJI KENDARAAN BERMOTOR	0,56% (<1%)
7	<b>PERSENTASE KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAKSANAKAN UJI KIR TAHUN 2024</b>	<b>58,12%</b>

Setiap kendaraan melaksanakan uji kendaraan bermotor sebanyak 2 kali / tahun sehingga Data Keseluruhan kendaraan yang melaksanakan uji KIR dibagi 2 ( $11.869 / 2 = 5.935$ ). Tingkat Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor =  $((5.935 / 10.212) \times 100\%) = 58,12\%$ . Secara Keseluruhan capaian realisasi terhadap target kinerja mencapai **96,87%**.

Kemudian dari angkutan perkotaan bisa dihitung dari jumlah penumpang BRT selama tahun 2024 sebagai bentuk dukungan terhadap sasaran penurunan dampak perubahan iklim, berikut rincian penumpang BRT Tahun 2024 :

**Tabel 3.7 Data Jumlah Penumpang BRT Kota Cirebon Tahun 2024**

No	Bulan	Jumlah Penumpang		Total
		Dewasa	Pelajar	
1.	Januari	3711	2510	6221
2.	Februari	3358	2573	5931
3.	Maret	3647	2242	5889
4.	April	4179	2641	6820
5.	May	4045	2692	6737

6	June	4014	2297	6311
7	Juli	4188	2404	6592
8	Agustus	3943	2421	6364
9	September	4012	2086	6098
10	Oktober	3908	2409	6317
11	November	3730	2142	5872
12	Desember	4749	2559	7308
	<b>TOTAL</b>			<b>76.460</b>
	<b>Rata Rata Per Bulan</b>			<b>6.372</b>
	<b>Rata Rata Per Hari</b>			<b>209</b>

Selama Koridor II beroperasi, BRT kota Cirebon mengalami progress yang sangat signifikan yang sedari awal pada koridor I sering mengalami rit perjalanan tanpa penumpang dan lintasan trayeknya tidak proyektif terhadap catchment aktivitas masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan yang dampaknya terasa sampai hari ini BRT Koridor II sudah mencapai rataan penumpang per hari sebanyak 209 orang.

Kemudian kegiatan kami selama tahun 2024 yang mendukung sasaran penurunan dampak perubahan iklim selama tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rampcheck angkutan Umum yang dilaksanakan selama periode lebaran dan Natal Tahun Baru





Gambar 3.18 Rampcheck di Terminal

2. Pelaksanaan Studi Banding BRT ke Surakarta dan Yogyakarta untuk melihat secara langsung penyelenggaraan BRT di 2 kota tersebut



Gambar 3.19 Studi Banding

**Sasaran 2 : “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat daerah”**

Sasaran kedua ini terkait kinerja penyelenggaraan perangkat daerah yang indicator yang akan dinilai berkaitan dengan Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah, yang pada tahun ini Pencapaian indikator sasaran tersebut dapat diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 3.8**

**Capaian IKU 3 Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Capaian Tahun 2024
Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	<b>76,25 Poin</b>	74,04 Poin	74,38 Poin	74,63 Poin	<b>TERLAMPAUI</b>

Capaian sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan perangkat daerah indikatornya berkaitan evidence SAKIP Dinas Perhubungan mulai dari Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi yang menjadi gambaran rangkaian yang mendelegasikan hasil dari nilai SAKIP perangkat Daerah yang apabila salah satu dokumen tidak dikerjakan maka akan menjadi celah untuk mendapatkan skor rendah. Setiap tahun komitmen kami akan selalu menjaga tren positif di dalam penilaian SAKIP perangkat daerah sehingga sejalan dengan capaian IKU ke-3 Dinas Perhubungan.

**3.2 Akuntabilitas Keuangan**

**3.2.1 Realisasi Anggaran**

Jumlah anggaran tahun 2024 sebesar **Rp. 29.120.251.287,-** dengan rincian:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 28.620.251.287,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.178.349.090,- atau prosentase terserapnya sebesar 94,96%.
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 487.420.500,- atau 97,48%.

*Tabel 3.9*

*Perbandingan Realisasi Anggaran periode 2023 – 2024*

*(dalam ribuan rupiah)*

	Belanja Operasi	Belanja Modal	Realisasi	%	Total Anggaran
Tahun 2023	Rp 26.425.138.486	Rp 2.612.760	Rp 26.427.751.246	97%	Rp 27.152.591.117
Tahun 2024	Rp 27.178.349.090	Rp 487.420.500	Rp 27.665.769.590	95,05%	Rp 29.120.251.287

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dari segi penyerapan anggaran Tahun 2024 mengalami penurunan di angka 95,05% terhadap Pagu Anggaran Tahun 2024. Merujuk perbandingan capaian realisasi tahun 2023 dan 2024 kami mengalami peningkatan sebesar 1,04% pada tahun 2024 terhadap tahun 2023.

Tabel 3.10

Pagu dan Realisasi Anggaran Terhadap Indikator Capaian Sasaran Strategis

NO	Indikator Sasaran	Pagu	Realisasi	%
1	Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Rp 1.976.388.938	Rp 1.881.383.901	95,19%
2	Persentase Kendaraan Bermotor yang melaksanakan UJI KIR	Rp 2.466.272.352	Rp 2.310.624.261	93,68%
3	Nilai Capaian Evaluasi SAKIP Perangkat daerah	Rp 24.677.589.997	Rp 23.473.761.428	95,12%
4	JUMLAH	Rp 29.120.251.287	Rp 27.665.769.590	95,05%

Tabel 3.11

Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Rp. 24.677.589.997</b>	<b>Rp. 23.473.761.428</b>	<b>95,12</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 248.739.256	Rp 236.520.944	95,08
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 13.180.374.362	Rp 12.287.427.519	93,2
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 164.002.720	Rp 148.920.000	90,8
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 362.442.819	Rp. 335.922.348	92,68
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 501.396.000	Rp. 488.816.500	97,5
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 9.736.081.700	Rp. 9.526.745.888	97,84
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 484.553.140	Rp. 449.408.229	92,74
<b>PROGRAM</b>	<b>Rp 4.442.661.290</b>	<b>Rp. 4.192.008.162</b>	<b>94,35</b>

<b>PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>			
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<b>Rp 899.625.968</b>	<b>Rp. 865.532.531</b>	<b>98,8</b>
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<b>Rp 224.869.970</b>	<b>Rp. 224.420.170</b>	<b>99,8</b>
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	<b>Rp 566.272.352</b>	<b>Rp. 452.593.782</b>	<b>80</b>
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<b>Rp 749.521.100</b>	<b>Rp. 689.059.300</b>	<b>91,9</b>
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<b>Rp 26.873.000</b>	<b>Rp. 26.873.000</b>	<b>100</b>
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp 1.900.000.000</b>	<b>Rp. 1.858.030.479</b>	<b>97,7</b>
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>Rp 75.498.900</b>	<b>Rp. 75.498.900</b>	<b>100</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 29.120.251.287</b>	<b>Rp 27.665.769.590</b>	<b>95,05%</b>

Dari table di atas dapat diketahui anggaran yang dimanfaatkan untuk mencapai target sasaran dalam misi ketiga sudah sejalan dengan capaian sasaran strategis dan sangat efisien dalam penggunaan sumber daya yang sudah dipetakan dalam bentuk anggaran yang bertujuan untuk kegiatan operasional pelayanan perhubungan yang meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian parkir, pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang sudah mulai digratiskan, penyediaan dan pemeliharaan lampu PJU, pengamanan lalu lintas di ruas jalan di kota Cirebon dan pengendalian lalu lintas pada saat event berskala lokal, regional dan nasional kita terlibat di dalamnya, penyediaan angkutan BRT yang sudah disubsidi oleh Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Perhubungan perlahan mulai dikenal masyarakat sehingga tingkat okupansi penumpang sudah lebih baik dari koridor yang sudah tidak beroperasi lagi. Pemeliharaan perlengkapan jalan sudah dilaksanakan di 3 lokasi untuk pengecatan marka jalan selama tahun 2024 dan pemeliharaan traffic light sudah dianggarkan untuk pembelian

perlengkapan listrik untuk mengatasi trouble pada traffic light. Dengan demikian efektivitas anggaran sudah diterapkan selama tahun 2024 yang secara langsung berdampak bagi masyarakat meskipun belum semua lokasi yang dirasakan setidaknya sudah sangat terlihat di public bahwa kerja kami nyata dan konkret untuk perlengkapan jalan dan infrastruktur.

NO	PRODUK LAYANAN	RUANG LINGKUP	PENGGUNA LAYANAN	FRONT OFFICE PELAYANAN	WAKTU PENYELESAIAN	JUMLAH LAPORAN	SALURAN PENGADUAN	KET
1	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Administrasi dan Jasa	1. Pemilik Kendaraan bermotor 2. Perusahaan Ekspedisi Angkutan barang dan peti kemas, angkutan	Tersedia	59 menit	NIHIL	Whatsapp dan Aplikasi LAPOR	Jumlah Kendaraan yang Melaksanakan Uji Tahun 2024 = 11.869 Kendaraan
2	Pelayanan UPT Parkir	Jasa Perparkiran	Masyarakat Umum pengguna kendaraan bermotor	Tidak Tersedia	Majemuk	+/- 30 laporan Pengaduan / tahun	Whatsapp dan Aplikasi LAPOR	Jumlah Petugas Parkir yang memiliki surat tugas Tahun 2024 = 420 Petugas Parkir pada 324 lokasi parkir
3	Pelayanan UPT Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jasa dan Barang	Seluruh masyarakat dan pengguna jalan di Kota Cirebon	Tidak Tersedia	2 Hari (Perbaikan PJU)	+/- 30 laporan pengaduan / Tahun	Whatsapp dan Aplikasi LAPOR	Jumlah titik PJU di Kota Cirebon Tahun 2024 = 8.049 Titik Lampu
4	Pengurusan Perizinan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Administrasi Perizinan usaha	Pemilik Usaha di Kota Cirebon	Tersedia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kriteria Rendah 1 hari</li> <li>Kriteria Sedang 2 hari</li> <li>Kriteria Tinggi 3 hari</li> </ul>	NIHIL	Whatsapp dan Aplikasi LAPOR	Jumlah Badan Usaha/Orang yang menerbitkan Perizinan ANDALALIN Tahun 2024 = 13 Badan Usaha
5	Pelayanan BRT Kota Cirebon	Jasa Angkutan Kota	Masyarakat Kota Cirebon dan Sekitarnya	Tersedia	Tidak ada batas waktu	NIHIL	Whatsapp dan Aplikasi LAPOR	Jumlah BRT Kota Cirebon yang beroperasi Tahun 2024 = 3 Bus / 1 Koridor  Jumlah Penumpang BRT selama Tahun 2024 = 76.460 Penumpang
6	Pelayanan Perizinan Angkutan Kota Cirebon	Administrasi	Masyarakat Kota Cirebon dan Sekitarnya	Tersedia	+/- 1 hari kerja	NIHIL	Whatsapp dan Aplikasi LAPOR	Jumlah Perizinan Angkutan Umum yang direalisasikan Tahun 2024 = 241 Angkutan  Jumlah Izin Trayek yang direalisasikan = 6 Trayek
7	Penerbitan surat rekomendasi Parkir di Luar Ruang Milik Jalan (RUMIJA)	Administrasi	Masyarakat pengguna parkir	Tersedia	+/- 2 hari kerja	NIHIL	Whatsapp dan Aplikasi LAPOR	Jumlah Surat Rekomendasi Parkir di luar RUMIJA Tahun 2024 = 11 Surat Rekomendasi



### 3.3 Rencana Aksi Tindak Lanjut Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Cirebon melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja diantaranya dalam merealisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas Kinerja Tahun 2023. Rencana Aksi Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada identifikasi masalah kemudian disusun dengan berbagai bentuk tindakan yang dinilai dapat mengatasi masalah tersebut. Secara umum, seluruh komponen tersebut dapat dilaksanakan di Tahun 2024. Berikut laporan laporan penyelenggaraan peningkatan akuntabilitas kinerja tahun 2024 sesuai rencana aksi yang disusun sebagai berikut :

Rekomendasi Tahun 2024	LHE	Rencana Aksi	Target	Waktu Penyelesaian	Status
Melakukan Evaluasi terhadap IKU DISHUB TAHUN 2024-2026 yang masih belum ada irisannya terhadap sektor lingkungan padahal ada kalimat "Ramah Lingkungan"		Memperbaiki IKU DISHUB Tahun 2024-2026	1 Dokumen	Triwulan 1	Selesai
Memperbaiki Laporan BAB III Akuntabilitas Kinerja dengan menambahkan uraian terkait analisis efisiensi dan permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalahnya		Menyusun Laporan LKIP Tahun 2024 sesuai masuk perbaikan atas LKIP Tahun 2023	1 Laporan	Triwulan 1	Selesai

Sejumlah upaya tersebut dapat dijadikan katalis positif dalam peningkatan system akuntabilitas kinerja tahun 2025. Hasil evaluasi pada tahun 2024 ditunjukkan pada laporan hasil evaluasi dengan Nomor 700/LHE.092-PEP/2023 menunjukkan adanya peningkatan LHE dibandingkan Tahun 2023 yang tidak begitu signifikan sehingga pada tahun 2025 ini kami mengupayakan mendapatkan Poin LHE di angka 78 Poin, berikut nilai LHE dengan rincian sebagai berikut :

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI	NILAI	Status
			TAHUN 2023	TAHUN 2024	
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00	24.00	Tetap
2	Pengukuran Kinerja	30.00	20.10	21.00	Meningkat
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.00	12.00	Tetap
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	19.25	19.25	Tetap
	<b>Nilai AKuntabilitas Kinerja</b>	100	<b>75.35</b>	<b>76.25</b>	<b>Meningkat</b>
	<b>Predikat</b>		<b>BB</b>	<b>BB</b>	

### **3.4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Realisasi Kinerja**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon sudah menginventarisasi faktor katalis positif selama pelaksanaan kegiatan tahun 2024 yaitu dukungan kebijakan sosialisasi menggunakan angkutan kota menjadikan penumpang BRT mengalami peningkatan, kemudian berhasil menyelesaikan pemeliharaan marka jalan pada ruas Jalan Siliwangi dan Jalan Pemuda karena adanya dukungan anggaran yang pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada sama sekali.

Kemudian beberapa faktor penghambat sudah teridentifikasi oleh kami yaitu penyebab realisasi pendapatan parkir yang masih jauh dari target karena lemahnya pengawasan secara komprehensif pada setiap petugas parkir, belum bisa melihat potensi parkir yang ada, petugas parkir liar tidak bisa dihilangkan.

Kemudian faktor penghambat pada pelayanan uji berkala kendaraan bermotor adalah belum ada punishment bagi kendaraan yang tidak pernah melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor padahal pelayanan uji berkala kendaraan bermotor sudah digratiskan.

Pada UPT PJU ada faktor penghambat di dalam pelayanan pemeliharaan dan monitoring PJU antara lain kekurangan persediaan lampu baru, tidak adanya pegawai administrasi di UPT PJU sehingga persuratan dan laporan lainnya terlambat, tidak ada pendidikan dan pelatihan teknisi kelistrikan bagi pegawai baru.

Dengan demikian faktor – faktor hambatan tersebut sudah perlu disiapkan strategi dan tindak lanjutnya di tahun 2025 supaya hambatan tersebut bisa dimitigasi.

## BAB IV

### PENUTUP

Pagu Anggaran tahun 2024 yang nilainya sebesar Rp. 29.120.251.287,- menjadi pagu tahun berjalan yang tidak mengalami penyesuaian penyusutan sehingga kami bisa berakseferasi untuk melakukan pemeliharaan perlengkapan jalan. Kemudian kami berhasil menyelenggarakan Uji KIR kendaraan secara gratis, kemudian pelayanan pemeliharaan PJU sudah sangat berdampak di masyarakat walaupun masih kekurangan stok lampu tapi kami upayakan untuk cepat dan responsif memperbaiki lampu PJU, Kemudian parkir liar yang ada di kawasan tertib lalu lintas berhasil kami tindak dengan berkolaborasi bersama instansi lain meskipun outcomenya belum maksimal setidaknya kami mengupayakan mitigasi.

Adanya keberhasilan capaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan berkat semua pihak keluarga besar Dinas Perhubungan Kota Cirebon yang sudah berpartisipasi aktif di kantor maupun lapangan dan kelancaran koordinasi dengan instansi vertikal maupun instansi horizontal demi terlaksananya suatu kegiatan. Maka dari itu, Dinas Perhubungan mengucapkan terima kasih atas kaleidoskop kegiatan tahun 2024 yang sudah terlaksanakan dan pencapaian kinerjanya sudah sangat baik atas koordinasi dan kolaborasi kita semua. Semoga kegiatan tahun 2025 akan berjalan lebih baik lagi dari tahun 2024.

Cirebon, 31 Januari 2025

4. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON



Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si  
NIP. 19691214 199003 1 005



PEMERINTAHAN KOTA CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024




Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>4,682,073,350.00</b>	<b>2,884,122,000.00</b>	<b>61.60</b>	<b>4,437,753,896.00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	4,682,073,350.00	2,884,122,000.00	61.60	4,437,753,896.00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4,637,073,350.00	2,774,522,000.00	59.83	4,362,733,896.00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,637,073,350.00	2,774,522,000.00	59.83	2,635,382,000.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4,637,073,350.00	2,774,522,000.00	59.83	2,635,382,000.00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	1,727,351,896.00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	1,727,351,896.00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	45,000,000.00	109,600,000.00	243.56	75,020,000.00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	45,000,000.00	109,600,000.00	243.56	75,020,000.00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	45,000,000.00	109,600,000.00	243.56	75,020,000.00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4,682,073,350.00</b>	<b>2,884,122,000.00</b>	<b>61.60</b>	<b>4,437,753,896.00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4,682,073,350.00</b>	<b>2,884,122,000.00</b>	<b>61.60</b>	<b>4,437,753,896.00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>29,120,251,287.00</b>	<b>27,665,769,590.00</b>	<b>95.01</b>	<b>26,425,875,816.00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>28,442,092,587.00</b>	<b>27,006,749,090.00</b>	<b>94.95</b>	<b>26,423,263,056.00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	13,209,878,362.00	12,316,726,519.00	93.24	12,129,420,956.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,288,301,794.00	6,849,624,924.00	93.98	6,459,855,524.00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	5,305,644,830.00	5,139,222,800.00	96.86	4,784,675,580.00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	5,033,305,500.00	4,964,296,800.00	98.63	4,784,675,580.00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	272,339,330.00	174,926,000.00	64.23	0.00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	553,868,446.00	547,275,502.00	98.81	517,380,176.00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	544,066,888.00	540,832,642.00	99.41	517,380,176.00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9,801,558.00	6,442,860.00	65.73	0.00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	202,770,000.00	201,690,000.00	99.47	206,010,000.00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	202,770,000.00	201,690,000.00	99.47	206,010,000.00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	79,884,000.00	52,910,000.00	66.23	27,320,000.00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	44,026,000.00	30,460,000.00	69.19	27,320,000.00

5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	35,858,000.00	22,450,000.00	62.61	0.00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	177,201,000.00	172,690,000.00	97.45	189,550,000.00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	177,201,000.00	172,690,000.00	97.45	189,550,000.00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	297,736,725.00	292,504,380.00	98.24	301,556,880.00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	286,855,620.00	284,683,020.00	99.24	301,556,880.00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10,881,105.00	7,821,360.00	71.88	0.00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	128,612,053.00	22,788,224.00	17.72	15,740,864.00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	128,612,053.00	22,788,224.00	17.72	15,740,864.00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	242,768.00	71,185.00	29.32	65,248.00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	132,843.00	69,077.00	52.00	65,248.00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	109,925.00	2,108.00	1.92	0.00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	459,903,142.00	378,496,012.00	82.30	378,307,393.00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	447,143,194.00	371,149,393.00	83.00	378,307,393.00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	12,759,948.00	7,346,619.00	57.58	0.00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	14,349,664.00	10,494,099.00	73.13	9,812,369.00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	13,693,625.00	10,116,243.00	73.88	9,812,369.00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	656,039.00	377,856.00	57.60	0.00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	43,049,476.00	31,482,722.00	73.13	29,437,014.00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	41,081,427.00	30,349,199.00	73.88	29,437,014.00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1,968,049.00	1,133,523.00	57.60	0.00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	25,039,690.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	25,039,690.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,652,913,900.00	5,432,802,595.00	96.11	5,570,867,432.00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5,652,913,900.00	5,432,802,595.00	96.11	5,570,867,432.00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	5,652,913,900.00	5,432,802,595.00	96.11	5,570,867,432.00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	268,662,668.00	34,299,000.00	12.77	98,698,000.00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	234,103,668.00	0.00	0.00	76,200,000.00
5.1.01.03.02.0004	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	231,853,668.00	0.00	0.00	0.00
5.1.01.03.02.0006	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00
5.1.01.03.02.0018	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2,250,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	34,559,000.00	34,299,000.00	99.25	22,498,000.00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25,863,000.00	25,603,000.00	98.99	15,290,000.00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8,696,000.00	8,696,000.00	100.00	7,208,000.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13,332,214,225.00	12,831,992,092.00	96.25	12,943,842,100.00
5.1.02.01	Belanja Barang	1,412,993,989.00	1,243,178,100.00	87.98	1,628,495,956.00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1,404,712,909.00	1,236,193,100.00	88.00	1,617,195,956.00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0.00	0.00	0.00	50,820,000.00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	126,575,520.00	111,430,200.00	88.03	128,291,500.00

5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5,880,000.00	0.00	0.00	0.00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1,800,000.00	840,000.00	46.67	1,610,000.00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	672,000.00	672,000.00	100.00	2,527,200.00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4,832,000.00	4,832,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0.00	0.00	0.00	323,960.00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	399,301,954.00	287,143,250.00	71.91	393,771,390.00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	65,865,715.00	65,022,650.00	98.72	61,003,836.00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2,880,000.00	2,850,000.00	98.96	2,650,000.00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24,014,400.00	23,379,600.00	97.36	23,047,500.00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10,628,100.00	9,236,100.00	86.90	10,165,740.00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	308,994,700.00	298,722,800.00	96.68	504,898,830.00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	171,082,720.00	156,000,000.00	91.18	30,140,000.00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	15,265,800.00	13,243,800.00	86.75	31,080,000.00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	239,560,000.00	235,460,700.00	98.29	370,866,000.00
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	27,360,000.00	27,360,000.00	100.00	0.00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8,281,080.00	6,985,000.00	84.35	11,300,000.00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	8,281,080.00	6,985,000.00	84.35	11,300,000.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11,136,592,476.00	10,844,550,292.00	97.38	10,688,973,244.00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	10,932,008,640.00	10,645,121,888.00	97.38	10,397,052,811.00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0.00	0.00	0.00	13,880,000.00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	310,335,640.00	309,795,000.00	99.83	199,350,000.00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	336,285,000.00	278,250,000.00	82.74	0.00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	356,140,000.00	344,570,000.00	96.75	455,005,000.00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	52,975,000.00	52,650,000.00	99.39	52,650,000.00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	292,032,000.00	289,920,000.00	99.28	277,440,000.00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	566,280,000.00	565,560,000.00	99.87	540,000,000.00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	9,000,000.00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	108,030,000.00	102,100,000.00	94.51	101,000,000.00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	600,000.00	479,232.00	79.87	484,232.00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	19,080,000.00	14,333,940.00	75.13	12,077,980.00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8,834,664,000.00	8,634,925,660.00	97.74	8,693,268,193.00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	15,048,000.00	14,288,000.00	94.95	16,764,000.00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	10,368,000.00	8,469,356.00	81.69	8,572,206.00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21,171,000.00	20,780,700.00	98.16	17,561,200.00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2,620,836.00	2,053,404.00	78.35	2,661,633.00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1,164,816.00	912,624.00	78.35	1,182,948.00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,456,020.00	1,140,780.00	78.35	1,478,685.00

5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	28,675,000.00	28,675,000.00	100.00	19,528,800.00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	5,347,000.00	5,347,000.00	100.00	0.00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	22,176,000.00	22,176,000.00	100.00	16,809,600.00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1,152,000.00	1,152,000.00	100.00	2,719,200.00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	173,288,000.00	168,700,000.00	97.35	269,730,000.00
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	173,288,000.00	168,700,000.00	97.35	269,730,000.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	629,544,560.00	591,268,352.00	93.92	558,494,960.00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	629,544,560.00	591,268,352.00	93.92	558,494,960.00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	0.00	0.00	0.00	32,453,000.00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	361,528,560.00	334,398,360.00	92.50	335,567,040.00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	100,500,000.00	93,632,602.00	93.17	62,523,770.00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	40,040,000.00	40,011,390.00	99.93	30,770,550.00
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	48,000,000.00	48,000,000.00	100.00	48,945,600.00
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	58,500,000.00	54,300,000.00	92.82	34,000,000.00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10,920,000.00	10,900,000.00	99.82	8,795,000.00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10,056,000.00	10,026,000.00	99.70	5,440,000.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	153,083,200.00	152,995,348.00	99.94	67,877,940.00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	153,083,200.00	152,995,348.00	99.94	67,877,940.00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	141,083,200.00	140,995,348.00	99.94	55,877,940.00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12,000,000.00	12,000,000.00	100.00	12,000,000.00
5.1.04	Belanja Subsidi	1,900,000,000.00	1,858,030,479.00	97.79	1,350,000,000.00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,900,000,000.00	1,858,030,479.00	97.79	1,350,000,000.00
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,900,000,000.00	1,858,030,479.00	97.79	1,350,000,000.00
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1,900,000,000.00	1,858,030,479.00	97.79	1,350,000,000.00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>28,442,092,587.00</b>	<b>27,006,749,090.00</b>	<b>94.95</b>	<b>26,423,263,056.00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>678,158,700.00</b>	<b>659,020,500.00</b>	<b>97.18</b>	<b>2,612,760.00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	674,986,400.00	656,020,500.00	97.79	2,612,760.00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	500,000,000.00	487,420,500.00	97.48	0.00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	500,000,000.00	487,420,500.00	97.48	0.00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	500,000,000.00	487,420,500.00	97.48	0.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3,628,800.00	0.00	0.00	2,612,760.00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3,628,800.00	0.00	0.00	2,612,760.00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0.00	0.00	0.00	1,247,760.00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3,628,800.00	0.00	0.00	1,365,000.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	24,957,600.00	24,600,000.00	98.57	0.00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	24,957,600.00	24,600,000.00	98.57	0.00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	24,957,600.00	24,600,000.00	98.57	0.00

5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	146,400,000.00	144,000,000.00	98.36	0.00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	146,400,000.00	144,000,000.00	98.36	0.00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	146,400,000.00	144,000,000.00	98.36	0.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,172,300.00	3,000,000.00	94.57	0.00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	3,172,300.00	3,000,000.00	94.57	0.00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	3,172,300.00	3,000,000.00	94.57	0.00
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	3,172,300.00	3,000,000.00	94.57	0.00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>678,158,700.00</b>	<b>659,020,500.00</b>	<b>97.18</b>	<b>2,612,760.00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>29,120,251,287.00</b>	<b>27,665,769,590.00</b>	<b>95.01</b>	<b>26,425,875,816.00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>( 24,438,177,937.00 )</b>	<b>( 24,781,647,590.00 )</b>	<b>101.41</b>	<b>( 21,988,121,920.00 )</b>


  
 Kota Cirebon, 31 Desember 2024  
 Kepala DINAS PERHUBUNGAN  
 DINAS PERHUBUNGAN  
 Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si  
 NIP. 196912141990031005